

**ABDURRAHMAN WAHID: STUDY PEMIKIRAN TENTANG RELASI  
AGAMA DAN NEGARA**

Oleh:

**Mahar Tri Pamungkas<sup>1</sup>**

**Hermanu Joebagio, Saiful Bachri<sup>2</sup>**

**ABSTRACT:**

*This research is aimed at to know: (1) genealogy biography of Abdurrahman Wahid; (2) intellectual abroad of Abdurrahman Wahid when he was teenager; and (3) Abdurrahman Wahid's thought in the context of diversity of Indonesia and the relation of religion and state.*

*The method that is used in this research is phenomenology qualitative method. The steps done in this research covers: collecting data, data reduction, data display, and drawing conclusion. The sources of the research are interview and document. The techniques of collecting data in this research are literature review and interview. The validity of the data is done by data source triangulation. The technique of analyzing data is interactive technique, by reducing and displaying data while collecting data. The data in the form of field note is the data that has been dig and noted. The field notes then become systematic and logic data display based on the problem statements. The collecting data process that has been done, then the researcher arranges the discussion and draws the conclusion.*

*Based on the results of the research, it can be concluded that: (1) Abdurrahman Wahid is one of prominent figure of Indonesia has to be descendant of aristocrat of Hasyim Asy'ari who was founder of Tebuireng Muslim Boarding School and founder of Nahdlatul Ulama, so that Abdurrahman Wahid gets the important position in the society; (2) Abdurrahman Wahid has education and social intercourse experience that makes he has liberal, moderate, and progressive thought; (3) there is mutual symbiotic correlation between religion and state, both working together in the community, nation and religion protects religious life even guiding life in the country. Symbiotic relation of religion and state in Indonesia is stated in Pancasila, Indonesian Constitutional Law 1945, and Bhinneka Tunggal Ika slogan. Pancasila and the Constitution of 1945 is*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS.

<sup>2</sup> Doosen Pembimbing pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS.

*the final form of the best. Pancasila and the Constitution of 1945 into a platform capable of shelters a diversity of the Indonesian community.*

*Abdurrahman Wahid's thought about relation between religion and state based on fiqh perspective by adapting the condition of Indonesian social-cultural. The material about Abdurrahman Wahid can be inserted in History subject grade 12<sup>st</sup> Social in the material of the government system that have ever existed in Indonesia, starting from Old Order, New Order Government, until Reformation. The teacher should not only teach about the characteristics of government, how the running of the government is, the plus and minus of the government system, but also tell about the model of the figures that had ever been the leader in that government system. For example is Abdurrahman Wahid. We can take his positive behavior that shown up until now as a learning and good model. Those behaviors are democratic, anti-discrimination, and respect about pluralism.*

**Keywords:** *the relation of religion and state, Fiqh, Pancasila and Indonesian Constitutional Law 1945.*

## **PENDAHULUAN**

Abdurrahman Wahid adalah publik figur yang fenomenal dalam kehidupan sosial politik bangsa Indonesia, kehadirannya di dunia perpolitikan telah membawa dampak pada suasana dinamis dan segar. Para kuli tinta selalu penasaran dan meminta pendapat terhadap orang-orang yang mencela dan kritis terhadap gagasan-gagasan pemikiran dari santri Jombang tersebut. Kebanyakan orang menjadi khawatir terhadap Abdurrahman Wahid karena sebagai seorang kyai yang menjadi panutan tetapi pemikiran-pemikiran yang dimiliki sangat tidak lazim bagi masyarakat Indonesia. Sosok Abdurrahman Wahid yang fenomenal, di sisi lain juga penting dan realistis, sehingga membuat banyak orang menulis tentang pemikiran-pemikiran yang dimiliki, meskipun tidak semua orang mau menerima gagasan-gagasan yang diungkapkan oleh mantan presiden keempat Indonesia tersebut (Zastrouw, 1999).

Sebagai salah satu tokoh bangsa Indonesia, Abdurrahman Wahid banyak memiliki khazanah pemikiran yang penting. Salah satu pemikiran Abdurrahman Wahid adalah mengenai relasi agama dan negara.

Pemisahan agama dari politik tidak dikenal dalam Islam, bahkan agama dan politik saling membutuhkan, namun Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa tidak ada perintah untuk mendirikan negara Islam karena tidak adanya konsep dalam *Al-Qur'an* dan model baku dalam pergantian kekuasaan ketika masa setelah Rasulullah SAW. Islam tidak harus dijadikan sebagai sebuah ideologi hanya karena ingin menjadikan Islam sebagai bahasa universal masyarakat. Islam atau agama lain yang dijadikan sebagai sebuah ideologi dalam sebuah negara yang multikultural seperti Indonesia hanya akan memicu konflik kebangsaan. Konsep negara kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus diterima oleh umat Muslim Indonesia sebagai sebuah pilihan paling akhir dan terbaik di masa sekarang. Pengaturan mengenai agama, yaitu adanya pengakuan terhadap keberadaan keberagaman agama dalam negara sudah tercakup dalam Pancasila dan UUD 1945, sehingga tidak perlu lagi membuat wacana tentang negara berdasar agama (negara Islam). Agama-agama di masyarakat yang diakui negara sudah cukup membuktikan bahwa negara mampu mengapresiasi keberadaan nilai-nilai religiusitas dalam masyarakat (Bukhori, 2003).

Menurut Douglas Ramage, seperti yang dikutip Ellyasa Dharwis (1994: 103), Abdurrahman Wahid sangat mengapresiasi Pancasila sebagai jawaban atas berbagai masalah dalam kehidupan politik kebangsaan dan masyarakat. Pancasila juga dianggap sebagai kesepakatan politik yang dapat memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk berkembang sebagai bangsa yang kesatuan, karena di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai toleransi yang sangat berguna bagi Indonesia yang mengakui adanya demokrasi.

## KAJIAN TEORI

### 1. Relasi Agama dan Negara dalam Konteks Keindonesiaan

Ada tiga paradigma mengenai pola hubungan agama dengan negara. *Paradigma pertama* mengusulkan sebuah konsep agar agama dengan negara bersatu. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*), di mana wilayah agama meliputi wilayah politik juga. Paradigma ini berpendapat bahwa negara merupakan lembaga politik dan sekaligus lembaga keagamaan. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan Illahi (*divine sovereignty*). Kelompok Syi'ah menganut paradigma ini. Bagi kelompok Syi'ah, *imamah* atau kepemimpinan merupakan lembaga keagamaan dan menjadi bagian dari rukun iman. Kekuasaan politik *imamah* hanya diwariskan kepada Rasulullah dan keturunannya saja (*ahl al-bait*). *Paradigma kedua* memberikan penawaran sebuah konsep hubungan agama dan negara yang bersifat *sekularistik*. *Sekularistik* berarti hubungan agama terpisah dengan urusan dunia politik. Paradigma *sekularistik* menolak menjadikan Islam sebagai dasar penyelenggaraan negara atau paling tidak menolak determinasi Islam menjadi bentuk tertentu dari sebuah negara. *Paradigma ketiga* berpendapat bahwa agama dan negara mempunyai hubungan yang bersifat simbiotik, yaitu hubungan timbal-balik dan saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara agar agama dapat berkembang dalam negara. Sebaliknya, negara membutuhkan agama untuk mengembangkan negara dengan bimbingan etika dan moral (Ridwan, 2004).

Negara kita cenderung mengadopsi pola hubungan agama dan negara yang bersifat simbiotik. Agama dan negara memiliki jalinan hubungan yang saling memberi dan menerima yang termaktub dalam Pancasila. Apalagi kelompok Islam yang ada di Indonesia adalah kelompok Sunni, kelompok Islam yang menjadi mayoritas. Oleh sebab itu, paradigma simbiotik antara negara dengan agama dipilih sebagai jalan tengah guna mengakomodasi kemaslahatan masyarakat Indonesia yang bukan negara agama, bukan pula negara sekular.

## 2. Islam dan Negara (Politik) dalam Konteks Keindonesiaan

Islam sebagai agama samawi yang mempunyai komponen-komponen dasar seperti: *aqidah*, *syariah*, dan *akhlak*, mempunyai hubungan yang erat dengan dunia politik dalam arti luas. Islam berperan penting sebagai sumber motivasi masyarakat dan menumbuhkan sikap dan perilaku sosial politik. Implementasi peranan Islam tersebut dimuat dalam aturan *syariah* sebagai sekumpulan perintah dan larangan Allah, pembimbing bagi umat manusia, dan sebagai pengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Islam dan dunia politik mempunyai titik singgung yang kuat apabila kita melihat kedua aspek tersebut sebagai sebuah sarana untuk mengatur kehidupan manusia secara keseluruhan. Islam tidak hanya sekadar alat legitimasi sebagai sarana untuk memperoleh kedudukan dalam kekuasaan. Kehidupan politik yang hanya dinilai seperti itu akan membuat kabur makna dan peranan Islam dalam dunia politik. Oleh sebab itu, Islam harus dijadikan sebagai sumber inspirasi kultural dan kerangka berpikir dalam kehidupan dunia politik (Ridwan, 2004).

Ada dua sudut pandang mengenai hubungan antara Islam dan negara. *Pertama*, sudut pandang pemikiran *idealistik*, yang menyatakan bahwa Islam dan negara dirumuskan sebagai sebuah kesatuan, artinya sebuah negara yang sepenuhnya menggunakan wawasan Islam dalam penyelenggaraannya. Dalam pandangan ini, Islam adalah sebuah konsep negara yang harus dilaksanakan secara penuh dalam masyarakat. *Kedua*, sudut pandang *realistik*, yang berpandangan bahwa Islam dan negara tidak harus diwujudkan dalam satu kesatuan hubungan yang formal, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pemecahan masalah terkait dengan konstitusi dapat ditampung dalam Islam. Pemikiran *realistik* ini melahirkan paradigma bahwa fakta-fakta yang ada di lapangan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap solusi sebuah masalah. Sifat keislaman seorang Muslim dapat dilihat dari kemampuan perbuatannya di dalam masyarakat, bukan dalam bangunan konsep yang dihasilkan. Menurut Abdurrahman Wahid, Islam tidak memisahkan agama

dari politik, Islam tidak akan lepas dari politik. Politik menurut Islam harus bersifat *transformatif*, yang mampu melakukan modifikasi terhadap masyarakat. Politik menjadi penting ketika mampu memberdayakan masyarakat, mampu memberikan akomodasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan pikiran secara terbuka. (Bukhori, 2003).

Di Indonesia, Islam dan politik kenegaraan memang tidak terkait secara konstusional, namun penggunaan *syari'ah* (hukum Islam) diperbolehkan. Fakta tersebut sebagai dampak logis dari pertumbuhan sejarah yang ada di negara ini. Dengan demikian, Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia saat ini adalah bentuk negara yang paling ideal dan final. Negara Indonesia mengakui keberadaan agama dalam masyarakat, meskipun secara langsung tidak disebutkan dalam Pancasila (Bukhori, 2003).

### **3. Islam dan Ideologi Pancasila**

Pancasila yang merupakan kompromi politik, memungkinkan semua orang Indonesia dapat hidup bersama dalam sebuah negara kesatuan Indonesia. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak akan menjadi sebuah negara lagi. Pancasila dianggap sebagai sebuah ide yang telah memuat pluralisme dan nilai-nilai demokrasi. Abdurrahman Wahid menambahkan bahwa seluruh umat harus berpegang teguh pada Pancasila sebagai syarat bagi demokratisasi dan perkembangan Islam spiritual yang sehat dalam konteks nasional. Menurut Abdurrahman Wahid, Indonesia merupakan sebuah negara yang didasarkan pada sebuah konsensus yang diwujudkan dalam Pancasila. Abdurrahman Wahid pun berkeyakinan penuh bahwa pemerintahan yang berideologi Pancasila, termasuk negara damai yang harus dipertahankan. Hal itu merupakan cara paling realistik secara politik apabila dilihat dari pluralitas agama di Indonesia. Abdurrahman Wahid menambahkan bahwa yang paling penting adalah memperjuangkan nilai-nilai Islam, bukan universum formalistiknya. Dengan memperjuangkan nilai-nilai dalam Islam, berarti juga sudah memperjuangkan Islam itu sendiri. Islam merupakan sumber inspirasi-

motivasi, landasan etik moral, dan bukan sebagai sistem sosial dan politik yang berlaku secara menyeluruh. Islam tidak dibaca dari sudut pandang verbatim doktrinal, tetapi lebih ditangkap spirit dan rohnya (Marzuki Wahid & Moqsith Ghazali, 2010, *Annual Conference on Islamic Studies*, Banjarmasin).

Agama dan Pancasila harus ada hubungan yang bersifat simbiotik, artinya antara agama dengan negara harus ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Agama, terutama Islam sebagai agama yang mayoritas, harus memberikan legitimasi kepada Pancasila, dan Pancasila pun juga harus memberikan legitimasi pada agama-agama yang ada di Indonesia. Pancasila dengan agama tidak boleh disamakan secara keseluruhan karena keduanya mempunyai peran berbeda dalam masyarakat. Pancasila mempunyai fungsi sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara, dengan demikian Pancasila juga mempunyai keharusan berperan sebagai wadah aspirasi agama-agama dan mendukung kedudukan agama secara fungsional. Agama berfungsi sebagai landasan keimanan warga masyarakat dan menjadi sumber motivasi yang memberikan warna spiritual kepada kegiatan yang dilakukan masyarakat (Al-Brebesy, 1999).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif fenomenologi. Menurut Sutopo (2006), fenomenologi menilai tingkah laku manusia, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan, merupakan sebuah produk dari bagaimana orang melakukan tafsir terhadap kehidupan mereka sendiri. Tugas dari penelitian kualitatif adalah untuk menangkap proses itu, sehingga diperlukan apa yang disebut dengan pemahaman empati, dengan cara, kita berada dalam diri orang lain untuk mereproduksi diri dalam pikiran orang lain, perasaan, dan dasar yang menjadi alasan kegiatan yang dilakukan. Peneliti harus mampu

menangkap makna tingkah laku seseorang dengan cara berusaha melihat pandangan orang yang terlibat dan menjadi objek studi peneliti. Peneliti yang tidak melakukan hal itu, akan mengalami kesulitan untuk memahami objek penelitian. Misalnya saja, untuk memahami seorang anak yang melakukan sesuatu yang aneh menurut sudut pandang orang dewasa, kita harus memposisikan diri kita sebagai anak tersebut agar kita mampu memahami mengapa anak itu melakukan sesuatu yang aneh.

## **2. Sumber Data**

Peneliti harus benar-benar berpikir mengenai lengkap tidaknya sebuah informasi dan validitasnya dalam memilih sumber data yang digunakan. Data yang diperoleh dari beragam sumber data dapat menyebabkan validitas yang beragam pula, hal tersebut terjadi karena pengaruh kedekatan posisi pada sasaran studi dan terjadinya perspektif tafsir individual. Secara umum, jenis sumber data yang biasa dipakai dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi lima jenis, yaitu: narasumber atau informan, peristiwa, aktivitas, dan perilaku, tempat atau lokasi, benda, gambar, rekaman, serta dokumen dan arsip (Sutopo, 2006). Penelitian ini menggunakan sumber data berupa: narasumber atau informan dan dokumen.

Penelitian kualitatif menyebut posisi sumber data yang berupa manusia sebagai narasumber. Peran narasumber sangat penting, yaitu sebagai individu yang mempunyai informasi. Peneliti dan narasumber mempunyai kedudukan yang sama, oleh sebab itu narasumber tidak hanya sekadar memberikan pendapat pada peneliti, tetapi bisa juga memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang dimiliki. Mengingat posisi yang dimiliki sangat penting, maka dalam penelitian kualitatif sumber data berupa manusia lebih tepat disebut sebagai informan daripada seorang responden (Sutopo, 2006).

Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih sebanyak dua orang. Narasumber bernama Miftah Faqih yang merupakan Ketua RMI PBNU



dan narasumber kedua adalah Direktur Pusat Kajian Pesantren dan Demokrasi Pondok Pesantren Tebuireng.

Sumber data berikutnya adalah dokumen. Sutopo (2006) menjelaskan bahwa dokumen biasanya berbentuk bahan tertulis yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Sumber data yang berupa dokumen mayoritas memang berbentuk tulisan, namun ada juga yang berbentuk gambar atau benda peninggalan. Apabila catatan tersebut berwujud rekaman yang sifatnya formal dan terencana dalam organisasi sebagai bagian dari mekanisme kegiatan, maka catatan tersebut disebut arsip.

Dalam penelitian ini, sumber data dokumen yang digunakan adalah buku, jurnal, skripsi, artikel, dan rekaman wawancara di sebuah program televisi.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Menurut Estenberg, seperti yang dikutip Sugiyono (2011: 231), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data dengan metode wawancara terstruktur. Menurut Estenberg seperti yang dikutip Sugiyono (2011: 233), wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

Peneliti melakukan wawancara dengan dua orang narasumber yang dianggap memahami sosok Abdurrahman Wahid. Salah seorang

pengurus Tim Pustaka Pondok Pesantren Tebuireng, yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Pesantren dan Demokrasi, Roy Murtadho, dipilih peneliti sebagai salah satu narasumber. Roy Murtadho yang juga lulusan Pondok Pesantren Tebuireng dipilih karena mampu menggambarkan sosok Abdurrahman Wahid dan pemikirannya. Roy Murtadho mempunyai beberapa tulisan mengenai Abdurrahman Wahid yang terdapat dalam blog pribadi. Narasumber kedua adalah Miftah Faqih. Miftah Faqih merupakan Ketua Pimpinan Pusat RMI (Rabithah Ma'ahid Islamiyah) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang masih mempunyai ikatan kekerabatan dengan K. H. Abdullah Faqih, salah satu pengurus Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur.

Selain menggunakan metode wawancara terstruktur dalam teknik pengambilan data, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumen. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan sebuah peristiwa yang sudah berlalu. Bentuk dokumen ada bermacam-macam, seperti tulisan, gambar, dan karya-karya yang telah diciptakan oleh seseorang.

Dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari biografi Abdurrahman Wahid (karya Greg Barton), buku-buku karya Abdurrahman Wahid, buku-buku yang mengkaji tentang Abdurrahman Wahid, karya tulis lain yang mengkaji tentang Abdurrahman Wahid (skripsi, tesis, dan disertasi), jurnal, dan arsip-arsip lain yang mendukung penelitian ini.

#### **4. Uji Validitas Data**

Dalam penelitian ini, keabsahan data atau uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi. Menurut Sugiyono (2011), triangulasi adalah pengecekan data dengan menggunakan beberapa sumber melalui berbagai cara dan berbagai waktu.

Sutopo (2006) menyatakan bahwa triangulasi merupakan salah satu cara yang paling umum untuk peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Menurut Patton, seperti yang dikutip Sutopo (2006: 92-93), ada empat teknik triangulasi, yaitu triangulasi data, triangulasi peneliti,

triangulasi metodologi, dan triangulasi teori. Triangulasi merupakan sebuah teknik yang menggunakan fenomenologi sebagai pola pikir sehingga bersifat multiperspektif. Multiperspektif berarti kesimpulan yang mantap harus membutuhkan cara pandang yang banyak, tidak hanya satu. Perspektif yang beragam akan membentuk data yang lengkap, mendalam, dan mantap.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Menurut Patton, yang dikutip dalam Sutopo (2006: 93), teknik triangulasi sumber disebut juga sebagai triangulasi data. Triangulasi sumber mengarahkan peneliti agar menggunakan beragam sumber data yang berbeda dalam proses pengumpulan data, yang artinya data yang sifatnya sejenis atau sama akan lebih mantap nilai kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Data yang sama atau sejenis apabila digali dari sumber data yang berbeda akan lebih teruji lagi kebenarannya apabila dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber berbeda, baik sumber yang sejenis maupun tidak sejenis. Teknik triangulasi sumber dapat menggunakan satu jenis sumber data seperti informan, namun beberapa informan yang digunakan harus diusahakan posisinya dari kelompok atau tingkatan yang berbeda.

## **5. Analisis Data**

Terdapat tiga komponen utama yang harus dipahami oleh peneliti dalam proses analisis penelitian kualitatif. Menurut Miles & Huberman, seperti yang dikutip Sutopo (2006: 113), ketiga komponen tersebut adalah (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan simpulan serta verifikasi. Ketiga komponen tersebut harus ada dan dikembangkan, serta selalu terlibat dalam proses analisis, saling terkait, dan digunakan sebagai penentu arah isi dan simpulan. Tiga komponen analisis tersebut dikomparasikan secara tepat agar penelitian lebih mantap dan lengkap.

Reduksi data adalah salah satu komponen dalam analisis yang pertama kali dilakukan, meliputi proses seleksi data, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua informasi yang ditulis dari

lapangan. Proses reduksi data dilakukan selama pelaksanaan penelitian. Reduksi data sebenarnya sudah dimulai sejak peneliti memilih permasalahan, menyusun rumusan masalah, menyusun kerangka kerja, dan waktu penentuan teknik pengumpulan data. Reduksi data dilakukan dengan cara meringkas isi dari catatan data yang diperoleh di lapangan.

Sajian data merupakan sebuah rakitan organisasi informasi dan deskripsi berbentuk narasi lengkap yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan peneliti. Sajian data dibentuk berdasarkan pokok-pokok yang ada dalam reduksi data dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Sajian data merupakan narasi tentang berbagai hal yang ada di lapangan sehingga membuat peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis atau tindakan apa pun berdasarkan pemahaman peneliti tersebut. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun.

Peneliti harus sudah memahami berbagai hal yang ditemui sejak awal penelitian dengan melakukan pencatatan pola-pola, pernyataan-pernyataan, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Konklusi-konklusi yang ditangkap oleh peneliti dibiarkan tetap, meskipun masih kurang jelas, kemudian secara berkelanjutan semakin meningkat secara eksplisit, dan mempunyai landasan dan dukungan data yang semakin kuat. Simpulan yang ada kemudian diverifikasi agar menjadi mantap dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **6. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian yang digunakan adalah Pondok Pesantren Tebuireng, Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Perpustakaan Prodi Pendidikan Sejarah FKIP UNS, dan Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Penelitian dilakukan mulai Juli 2013-Mei 2014.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Biografi Genealogi Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid dilahirkan pada tanggal 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Tanggal lahir Abdurrahman Wahid memang simpang siur, hal tersebut karena Abdurrahman Wahid dilahirkan pada tanggal empat bulan delapan, namun dalam kalender Islam. Tanggal kelahiran Abdurrahman Wahid yang sebenarnya adalah tanggal 4 Sya'ban 1940 atau 7 September, bukan tujuh Agustus. Abdurrahman Wahid mempunyai nama lengkap Abdurrahman Ad-Dakhil, Ad-Dakhil diambil dari nama seorang pahlawan Dinasti Umayyah yang berhasil mengembangkan Islam di Spanyol hingga bertahan selama berabad-abad, sedangkan nama panggilan Abdurrahman Wahid yang lebih akrab di masyarakat adalah Gus Dur. Abdurrahman Wahid merupakan putra pertama pasangan Wahid Hasyim dan Solichah, yang mana keduanya merupakan putra dan putri pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam Tradisional terkuat di Jawa. Hasyim Asy'ari, ayah Wahid Hasyim, merupakan pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri salah satu Pondok Pesantren besar di Indonesia, Tebuireng dan Solichah adalah putri tokoh pendiri Nahdlatul Ulama yang lain, yaitu Bisri Syansuri. Abdurrahman Wahid merupakan anak pertama dari enam bersaudara. Kelima saudara Wahid yang lain antara lain, Aisyah, Sholahuddin Al-Ayyubi, Umar, Khadijah, dan Hasyim (Barton, 2003).

Abdurrahman Wahid mempunyai latar belakang kehidupan Muslim-tradisional, dengan demikian pemikiran politiknya banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang berkembang di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi seperti Nahdlatul Ulama merupakan implementasi dari paham Sunni, paham yang mencoba bersikap bijaksana terhadap perbedaan pandangan terhadap paham-paham yang lebih dahulu muncul. Paham *Sunni* berusaha mencari sebuah gagasan baru terhadap pemikiran politik yang saat itu berkembang. *Sunni* merupakan paham yang bersifat demokratis, terbuka, moderat, dan mengedepankan keseimbangan,

semua itu tercermin dalam sikap untuk menghadapi berbagai persoalan sosial-politik (Al-Brebesy, 1999).

## **2. Perantauan Intelektual Abdurrahman Wahid ketika Remaja**

Perjalanan intelektual Abdurrahman Wahid dimulai dari bimbingan orang tua. Willem Iskandar Bueller, teman dari Wahid Hasyim, merupakan salah satu teman bergaul Abdurrahman Wahid. Wahid Hasyim sering mengirim putra sulungnya itu ke rumah Bueller untuk belajar musik klasik Eropa. Abdurrahman Wahid menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar KRIS, Jakarta Pusat dan selanjutnya melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Matraman Perwari, sekolah yang dekat dari rumah. Pendidikan Abdurrahman Wahid saat itu bersifat sekular. Abdurrahman Wahid kemudian menempuh pendidikan menengah di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Yogyakarta pada tahun 1954 dan tinggal bersama Kiai Junaidi, seorang tokoh Muhammadiyah sekaligus anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah. Abdurrahman Wahid juga belajar di Pondok Pesantren Krapyak, di samping pendidikan formal di SMEP. Abdurrahman Wahid belajar di Krapyak sebanyak tiga kali dalam seminggu. Abdurrahman Wahid yang telah menyelesaikan pendidikan menengahnya pada tahun 1957, kemudian menempuh pendidikan di Pesantren Tegalrejo, Magelang sampai tahun 1959 (Moh. Dahlan, 2013).

Pada tahun 1964, Abdurrahman Wahid mendapatkan bantuan dari Departemen Agama untuk melanjutkan pendidikan di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Abdurrahman Wahid mengambil studi *Departement of Higher Islamic and Arabic Studies*. Kondisi Kairo yang berubah menjadi tidak kondusif membuat Abdurrahman Wahid memutuskan untuk berhenti dan pindah ke *Baghdad University*, Irak. Abdurrahman Wahid mengambil studi sastra. Abdurrahman Wahid begitu berminat dengan kajian Islam Indonesia sehingga dipercaya untuk melakukan penelitian tentang asal-usul keberadaan Islam Indonesia (Bukhori, 2003).

Abdurrahman Wahid kurang puas dengan apa yang sudah didapatkan di Baghdad, sehingga berpikir untuk melanjutkan perjalanan ke Eropa

selama satu tahun. Enam bulan di Belanda, empat bulan di Jerman, dan dua bulan di Perancis. Abdurrahman Wahid berharap akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di bidang perbandingan agama. Abdurrahman Wahid pun berusaha mencari informasi ke Universitas Leiden, namun ia justru mendapatkan hasil yang mengecewakan. Hasil belajar Abdurrahman Wahid selama di Universitas Baghdad sama sekali tidak diakui di Leiden dan sebagian besar Eropa.

Abdurrahman Wahid kemudian kembali ke Indonesia pada tahun 1971. Abdurrahman Wahid kemudian berkarir sebagai seorang pengajar di Tebuireng. Pada tahun 1972 sampai 1974, Abdurrahman Wahid menjadi Dekan Fakultas Perbandingan Agama, Ushuluddin di Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang. Abdurrahman Wahid kemudian menjabat sebagai sekretaris Pesantren Tebuireng pada tahun 1975 sampai 1979. Pada tahun 1979, Abdurrahman Wahid memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan berkarir di PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), menjadi dosen di IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN), dan mendirikan Pondok Pesantren Ciganjur di Jakarta Selatan (Al-Brebesy, 1999).

Abdurrahman Wahid adalah salah satu tokoh agama yang mempunyai pemikiran liberal di Indonesia. Ide-ide pemikiran yang mempunyai ciri khas revolusioner membuat Abdurrahman Wahid berbeda dari para pemikir Islam yang lain. Abdurrahman Wahid merupakan tokoh yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap permasalahan demokrasi dan humanitarisme sehingga Abdurrahman Wahid dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dengan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Abdurrahman Wahid menjadi seorang pemikir yang progresif dan liberal, baik menyangkut permasalahan agama, sosial, budaya, maupun politik. Pemikiran yang progresif dan liberal tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan luas yang diperoleh dari pergumulan wacana yang digeluti sejak remaja (Bakri & Mudhofir, 2004).

Pemikiran Abdurrahman Wahid yang liberal, moderat, dan longgar secara garis besar dikembangkan melalui tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan

tersebut dapat dibagi menjadi dua periode. *Periode pertama* meliputi tulisan Abdurrahman Wahid antara tahun 1970 hingga akhir tahun 1980. Tulisan Abdurrahman Wahid pada periode tersebut banyak menyoroti isu perkembangan dan pembaruan pesantren. *Periode kedua* dimulai dari tahun 1980-an sampai tahun 1990-an. Periode ini merupakan masa ketika Abdurrahman Wahid lebih menyoroti isu-isu mengenai demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan pribumisasi Islam sebagai perhatian utama tulisan-tulisannya. Sebagai seorang intelektual, Abdurrahman Wahid menuangkan pemikiran-pemikiran melalui tulisan-tulisan dalam berbagai bentuk topik, beberapa ada yang sudah dijadikan buku dan sebagian yang lain menjadi artikel ilmiah sebagai bagian dari sebuah buku editorial (Bakri & Mudhofir, 2004).

### **3. Pemikiran Abdurrahman Wahid dalam Konteks Keberagaman Kehidupan di Indonesia dan Relasi Agama dan Negara**

Pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai konsep relasi agama (Islam) dengan negara menggunakan metode fungsionalisme (struktural). Abdurrahman Wahid beralasan bahwa untuk merumuskan relasi agama dengan negara dengan tepat harus menggunakan sudut pandang fungsional, yaitu memandang agama dan negara dalam satu kerangka yang mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat. Negara dan agama pada dasarnya mempunyai fungsi yang berbeda, namun dapat dikatakan bahwa keduanya saling melengkapi, yang satu tidak dapat hidup tanpa kehadiran yang lain. Pola yang digunakan Abdurrahman Wahid adalah metode keseimbangan dengan mengedepankan terciptanya sebuah keharmonisan, karena dalam teori, kondisi harmonis dapat tercipta di masyarakat apabila kebudayaan, kepribadian, dan sistem sosial cocok, baik secara normatif maupun struktural (Bukhori, 2003).

Menurut Musthafa Abd. Rahman, dalam Suhandi (2010: 123-124), substansi pemikiran Abdurrahman Wahid tentang agama dan negara adalah bahwa agama merupakan sumber inspirasi orang yang beragama dan bernegara. Abdurrahman Wahid memberi contoh bahwa dia pergi ke



masjid bukan karena perintah negara, melainkan perintah agama. Ajaran agama menjadi sumber inspirasi bagi Abdurrahman Wahid. Lebih lanjut, Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa agama merupakan sumber pendorong kehidupan untuk mengembangkan ajaran-ajaran agama itu sendiri, baik dengan negara atau tanpa negara. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa hal yang bersifat pribadi atau substansi lebih penting dan utama daripada hal-hal yang berbentuk formalisme atau simbol-simbol

Menurut Abdurrahman Wahid, berdasarkan konteks ke-Indonesiaan, Islam tidak boleh menjadi agama negara. Pemikiran keislaman Abdurrahman Wahid dalam kerangka Islam kosmopolitan yang terkait dengan hubungan agama dengan kebangsaan merupakan kelanjutan dari corak pemahaman dan pembaruan keagamaan. Abdurrahman Wahid menilai bahwa Islam harus dijadikan faktor komplementer dengan komponen-komponen bangsa yang lain untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Apabila asas kenegaraan menggunakan Islam secara legal dan formal, dikhawatirkan akan menciptakan permasalahan psikologis bagi umat nonmuslim yang juga merupakan bagian dari Indonesia dalam partisipasi membangun bangsa. Apabila hal itu terjadi, maka akan menyebabkan ikatan kebangsaan yang dibentuk para pendiri bangsa Indonesia menjadi rapuh. Abdurrahman Wahid lebih menginginkan adanya negara tempat umat Islam dapat menjalankan *syari'ah* dan menegakkan tauhid tanpa harus menjadikan *syari'ah* sebagai sumber hukum. Abdurrahman Wahid menambahkan bahwa kunci *syari'ah* terletak pada sejauh mana umat Islam mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan pada proses melegalkan Islam sebagai sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan merupakan realitas historis ke-Indonesiaan yang tidak dapat dibantah. Dasar itulah yang dijadikan Abdurrahman Wahid sebagai penegas pentingnya mengimplementasikan Islam sebagai etika sosial yang memosisikan Islam sebagai faktor

komplementer dalam kehidupan masyarakat plural negara Indonesia (Bakri & Mudhofir, 2004).

Hubungan agama dan negara harus terjalin secara timbal balik. Negara harus mampu mengatur masalah keagamaan, mulai dari memelihara hingga mengelola agama. Negara bahkan harus dipatuhi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa negara dan agama memang terpisah secara konstitusional, namun diperbolehkan apabila negara menjalankan *syari'ah* Islam seperti Indonesia sekarang ini (Ali Masykur Musa, 2011).

Hubungan antara agama dengan negara di Indonesia yang bersifat simbiotik sangat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa Pancasila dan agama perlu diposisikan pada sebuah pola hubungan yang sifatnya fungsional dan jelas. Pancasila tidak menggusur keberadaan agama dari kedudukan historisnya dan tidak juga bermaksud untuk menggantikan posisi agama. Agama pun harus dirumuskan sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Pola hubungan yang demikian menunjukkan sifat defensif dari agama dan Pancasila itu sendiri, yang berarti bahwa keduanya terjadi pemisahan kedudukan secara penuh (*in toto*). Abdurrahman Wahid memberikan sebuah cara bahwa Pancasila harus diposisikan sebagai *rule of game* yang menghubungkan semua agama dan paham dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila harus memperlakukan semua agama sama di mata hukum dan dalam pergaulan masyarakat (Al-Brebesy, 1999).

**3.1. Relevansi dengan Mata Pelajaran Sejarah Kelas XII IPS Semester I, Standar Kompetensi: Menganalisis Perjuangan Sejak Orde Baru sampai dengan Masa Reformasi, Kompetensi Dasar: Menganalisis Perkembangan Politik dan Ekonomi serta Perubahan Masyarakat di Indonesia pada Masa Reformasi dengan Pendekatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan Keteladanan**

Sosok penting Abdurrahman Wahid, baik di bidang politik maupun keagamaan, dapat kita kaitkan dengan pembelajaran Sejarah kelas XII IPS, dalam standar kompetensi yang mengharuskan siswa mampu merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa Proklamasi sampai masa Reformasi, dengan salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai adalah merekonstruksi perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Reformasi. Tidak semua buku Sejarah untuk Sekolah Menengah Atas menjelaskan semua pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia, sebagian besar buku-buku hanya menjelaskan hingga akhir keruntuhan Orde Baru. Padahal para siswa juga harus mengetahui pemerintahan-pemerintahan dan siapa-siapa saja yang pernah berkuasa di Indonesia. Dari sinilah kreativitas seorang guru diasah. Guru Sejarah seharusnya menyampaikan pula pemerintahan-pemerintahan yang berkuasa setelah Orde Baru runtuh, seperti era pemerintahan B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid, atau Megawati Soekarno Putri. Metode penyampaian materi dapat menggunakan diskusi maupun penjelasan langsung dari guru. Penjelasan yang disampaikan kepada para siswa pun tidak perlu panjang lebar, yang paling penting adalah inti dari sistem pemerintahan masing-masing Presiden. Pembelajaran lain yang dapat disampaikan adalah karakter-karakter dari para pemimpin bangsa yang dapat diteladani oleh para siswa. Seperti sosok Abdurrahman Wahid yang tidak seharusnya kita nilai sebagai orang yang kontroversial. Sikap-sikap positif yang ditunjukkan selama ini dapat kita ambil sebagai pembelajaran dan teladan baik. Sikap-sikap tersebut antara lain, demokratis, anti-diskriminasi, dan menjunjung tinggi sikap pluralisme.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Abdurrahman Wahid yang merupakan cucu dari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng dan pendiri Nahdlatul Ulama, serta merupakan putera sulung dari tokoh nasional yang ikut dalam kelompok

pembentukan dasar konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Piagam Jakarta, mempunyai garis keturunan darah biru yang berperan dalam perjalanan hidup sekaligus membawa Abdurrahman Wahid menduduki posisi-posisi penting, baik dalam dunia pendidikan, politik, maupun keagamaan. Posisi-posisi penting yang diperoleh Abdurrahman Wahid tidak semata-mata hanya karena faktor keturunan saja, melainkan kemampuan intelektual, kemampuan politik, kemampuan keagamaan, dan kemampuan sosial yang dimiliki.

2. Pemikiran Abdurrahman Wahid yang menggunakan pendekatan *fiqh* dan bercorak liberal, moderat, progresif, dipengaruhi oleh tiga faktor. Faktor pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga Abdurrahman Wahid yang fanatik terhadap dunia Islam, bukan berarti harus menutup diri dengan kelompok agama lain. Abdurrahman Wahid pun tidak hanya berkecimpung dengan dunia Nahdlatul Ulama saja, namun juga dengan golongan di luar Nahdlatul Ulama, seperti ketika Abdurrahman Wahid belajar di Yogyakarta dan tinggal dengan salah satu tokoh Muhammadiyah, Kiai Junaidi dan Willem Buhl seorang warga Jerman yang menjadi guru Bahasa Belandanya ketika duduk di bangku sekolah dasar. Faktor kedua adalah lingkungan pendidikan. Abdurrahman Wahid gemar membaca buku-buku produk Barat sejak remaja, sehingga membuat Abdurrahman Wahid mampu menjadi pribadi yang pandai menyesuaikan dengan lingkungan tempat dia berada. Pendidikan yang diterima ketika menuntut ilmu di Timur Tengah juga membuat Abdurrahman Wahid mempunyai pemikiran yang liberal, sekular, dan moderat. Faktor ketiga adalah lingkungan pergaulan. Abdurrahman Wahid bergaul dengan orang-orang yang berada dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan para pemikir kritis luar negeri ketika belajar di Mesir, Irak, dan Eropa. Lembaga Swadaya Masyarakat dan dialognya dengan para pemikir kritis luar negeri menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap

perkembangan pola pikir Abdurrahman Wahid yang menjadi progresif dan moderat ketika kembali ke Indonesia.

3. Abdurrahman Wahid adalah seorang tokoh penting Indonesia yang mempunyai rasa cinta terhadap budaya lokal dan Islam tradisional. Oleh karena itu, Abdurrahman Wahid menjadikan kedua hal tersebut sebagai dasar pemikiran terkait relasi agama dengan negara. Bagi Abdurrahman Wahid, agama harus menjadi landasan moral dan etika dalam bernegara, sedangkan negara harus menjadi pengayom perkembangan agama-agama yang ada di Indonesia. Dilihat dari paradigma ke-Indonesia-an, apabila negara Indonesia melegal-formalkan sebuah agama sebagai dasar konstitusi, maka akan terjadi konflik sosial, terlebih Indonesia merupakan negara majemuk dengan berbagai agama, ras, etnis, dan budaya. Abdurrahman Wahid menambahkan bahwa di dalam *al-Qur'an* pun juga tidak ada perintah yang mengharuskan untuk mendirikan sebuah negara berideologikan sebuah agama, katakanlah seperti negara Islam.

Pemikiran Abdurrahman Wahid terkait permasalahan agama dengan negara menggunakan pendekatan *fiqh*. Pendekatan *fiqh* dimaknai sebagai pendekatan sosio-kultural yang menekankan bahwa Islam harus mampu hidup berdampingan dan bekerja sama dengan kelompok agama lain guna memajukan negara dan mencapai demokrasi. Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa negara Indonesia yang berideologikan Pancasila merupakan negara final dan terbaik. Pancasila adalah nasionalisme bangsa Indonesia, sekaligus sebagai sebuah bukti bahwa Indonesia yang berpenduduk majemuk mampu menjadi satu dalam sebuah konsensus dan kompromi dalam sistem toleransi.

### **Saran**

1. Bagi para peneliti  
Untuk mengkaji pemikiran seorang tokoh yang kontroversi dan sulit dipahami oleh kebanyakan orang, metodologi fenomenologi dapat

menjadi pilihan pertama sebagai metodologi penelitian. Fenomenologi yang mampu menafsirkan tingkah laku dan pemikiran seseorang, dapat mempermudah peneliti untuk mendalami kehidupan seorang tokoh, terutama tokoh-tokoh yang berbeda dengan orang kebanyakan, seperti Abdurrahman Wahid yang kontroversial.

2. Bagi para pendidik Sejarah

Keteladanan Abdurrahman Wahid dapat dijadikan inspirasi bagi para generasi penerus bangsa. Keteladanan tersebut dapat disisipkan melalui pembelajaran Sejarah dalam materi sistem pemerintahan yang pernah ada di Indonesia, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Guru seyogyanya tidak hanya mengajarkan bagaimana ciri pemerintahan, bagaimana proses berjalannya sistem pemerintahan, kelebihan dan kelemahan dari sistem pemerintahan tersebut, namun juga menyampaikan keteladanan dari tokoh-tokoh yang pernah menjadi pemimpin di Indonesia saat menjalankan sistem pemerintahan.

3. Bagi masyarakat umum

Masyarakat umum masih banyak yang menilai sosok Abdurrahman Wahid adalah orang yang kontroversial dan dianggap tidak normal layaknya tokoh-tokoh Indonesia yang lain. Bagi para pembaca yang masih menilai Abdurrahman Wahid secara apriori, dapat menggunakan penelitian ini sebagai salah satu referensi agar tidak lagi menilai ketokohan seseorang hanya dari satu sudut pandang saja.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abd. Rahman, Musthafa. (1999). "Gus Dur, Agama, dan Negara". Dalam Irwan Suhanda (Ed). *Gus Dur Santri Par Excellence (Teladan Sang Guru Bangsa)*. (hlm. 123-124). Jakarta: Kompas.

Al-Brebesy, Ma'mun Murod. (1999). *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur & Amien Rais tentang Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Bakri, Syamsul & Mudhofir. (2004). *Jombang Kairo, Jombang Chicago (Sintesis Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur dalam Pembaruan Islam di Indonesia)*. Solo: Tiga Serangkai.
- Barton, Greg. (2003). *Biografi Gus Dur (The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid)*. Terj. Lie Hua. Yogyakarta: LKiS. (Buku asli diterbitkan 2002)
- Bukhori, Pahrurroji M. (2003). *Membebaskan Agama Dari Negara (Pemikiran Abdurrahman Wahid dan 'Ali 'Abd ar-Raziq)*. Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Dahlan, Moh. (2013). *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press.
- Musa, Ali Masykur. (2011). *Nasionalisme di Persimpangan (Pergumulan NU dan Paham Kebangsaan Indonesia)*. Jakarta: Erlangga.
- Ngatawi, Al-Zastrouw. (1999). *Gus Dur, Siapa Sih Sampeyan (Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur)*. Jakarta: Erlangga.
- Ramage, Douglas E. (1993). "Pemahaman Abdurrahman Wahid Tentang Pancasila dan Penerapannya (Dalam Era Pasca Asas Tunggal)". Dalam Ellyasa KH. Dharwis (Ed). *Gus Dur dan Masyarakat Sipil*. (hlm. 103). Yogyakarta: LKiS.
- Ridwan. (2004). *Paradigma Politik NU (Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

**Artikel:**

- Wahid, Marzuki & Ghazali, Abd. Moqsith. (2010). *Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Nahdlatul Ulama*, hlm. 459-484. Banjarmasin: Annual Conference Islamic Studies (ACIS) Ke-10.